



**SIAP SIAGA**  
Australia – Indonesia Partnership  
for Disaster Risk Management



**Australian Government**

# **Pengarusutamaan GEDSI dalam Penanggulangan Bencana: Toolkit 4**

**Peran Aktor Non-Pemerintah dalam  
Membangun Desa Tangguh Bencana  
Inklusif**

*Disiapkan sebagai bagian dari Inisiatif  
Keterlibatan GEDSI SIAP SIAGA dalam  
Penanggulangan Bencana di Indonesia*

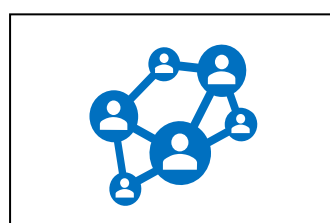
SIAP SIAGA didukung oleh Pemerintah Australia dan diimplementasikan oleh Palladium Pty Ltd ([www.thepalladiumgroup.com](http://www.thepalladiumgroup.com))

Publikasi ini telah didanai oleh Pemerintah Australia melalui Departemen Luar Negeri dan Perdagangan. Pandangan yang diungkapkan adalah dalam publikasi ini adalah milik tim penulis dan tidak selalu mencerminkan pandangan Pemerintah Australia. © 2022

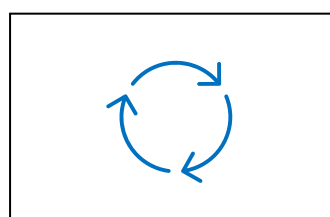
## Dalam *toolkit* ini, Anda akan memahami:



Gambaran umum elemen Desa Tangguh Bencana yang inklusif



Pemahaman tentang peran pemangku kepentingan yang berbeda untuk mendukung ketangguhan lokal yang inklusif



Panduan langkah demi langkah untuk memastikan kegiatan ketangguhan lokal yang inklusif

Toolkit ini adalah dokumen hidup yang akan diadaptasi dan ditingkatkan seiring kemajuan SIAP SIAGA dalam mempelajari dan beradaptasi dengan proses pengintegrasian prioritas Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial, khususnya mengenai kelompok terpinggirkan dan kelompok kurang beruntung lainnya dalam konteks bencana yang beragam.

## Daftar Isi

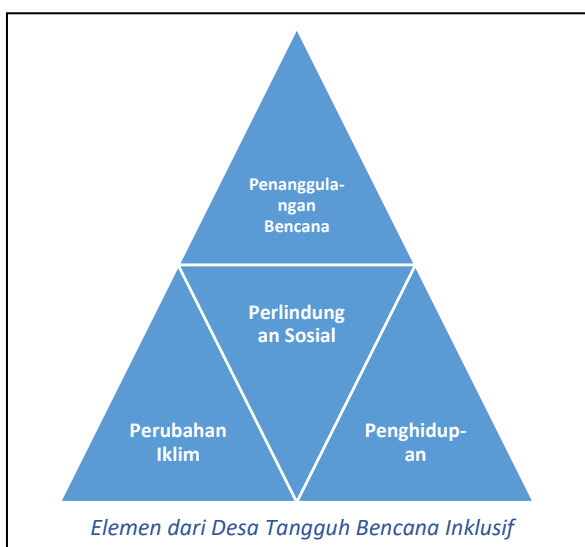
<b>LIST OF ABBREVIATIONS .....</b>	<b>5</b>
<b>APA ITU DESA TANGGUH BENCANA YANG INKLUSIF? .....</b>	<b>6</b>
<b>JENIS INTERVENSI KETANGGUHAN LOKAL YANG MEMBUTUHKAN PENGARUSUTAMAAN GEDSI .....</b>	<b>10</b>
<b>MEMASTIKAN KEGIATAN DESA TANGGUH BENCANA INKLUSIF MENGGUNAKAN DAFTAR PERIKSA GEDSI.....</b>	<b>12</b>
<b>DAFTAR PERIKSA KESETARAAN GENDER, INKLUSI DISABILITAS DAN SOSIAL (GEDSI) .....</b>	<b>13</b>
<i>Bagian 1. Penilaian Cepat dan Konsensus .....</i>	<i>13</i>
<i>Bagian 2. Pelaksanaan Kegiatan .....</i>	<i>18</i>
<i>Bagian 3. Pemantauan and Analysis.....</i>	<i>21</i>
<i>Bagian 4. Pembelajaran dan Komunikasi .....</i>	<i>23</i>
<b>REFERENCES .....</b>	<b>26</b>
<b>LAMPIRAN 1: KERANGKA PERATURAN PRBBK .....</b>	<b>27</b>

## List of Abbreviations

Destana	Desa Tangguh Bencana
DFAT	Australian Department of Foreign Affairs and Trade
DFID	UK Department for International Development
GEDSI	Gender Equality, Disability and Social Inclusion
KIE	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi
LGBTQIA	Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex, Asexual
OMS	Organisasi Masyarakat Sipil
OPD	Organisasi Penyandang Disabilitas
PRB	Pengurangan Risiko Bencana
PRBBK	Pengurangan Risiko Bencana Berbasis Komunitas
PUG	Pengarusutamaan Gender
TTX	Table Top Exercise
WRO	Women's Rights Organisation

## Apa itu Desa Tangguh Bencana yang Inklusif?

Desa tangguh bencana inklusif adalah desa yang berbasis kesejahteraan, mengintegrasikan manajemen risiko bencana iklim yang cerdas dan program perlindungan sosial, yang difokuskan pada mata pencaharian dan ketangguhan ekonomi dan penerapan prinsip-prinsip pemberdayaan gender dan inklusi sosial (GEDSI). Prinsip-prinsip GEDSI mencakup komitmen global dari “*Leave No One Behind*” (Tidak Ada Seorang Pun yang Tertinggal), dan didasarkan pada “*Nothing About Us Without Us*” (Tak Suatu Ada Hal Tentang Kami, Tanpa Kami) seperti yang disampaikan oleh pegiat disabilitas, yang menekankan bahwa tidak ada kebijakan publik yang tidak melibatkan atau tidak ada perwakilan dari kelompok rentan. Elemen-elemen terpadu dari pendekatan GEDSI ini akan



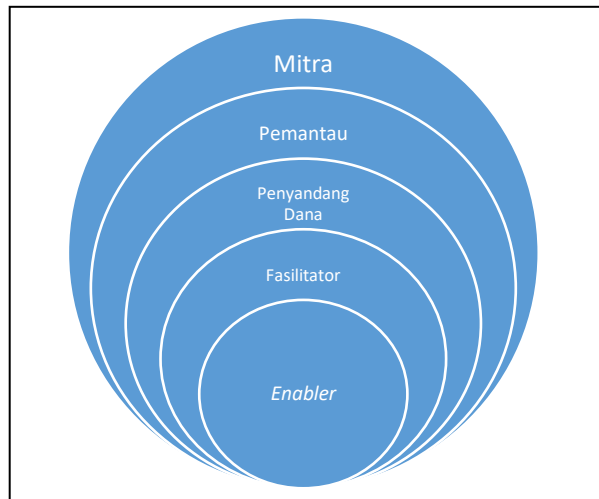
memastikan bahwa desa tangguh bencana yang inklusif menyatukan upaya pengurangan risiko bencana, adaptasi perubahan iklim dan perlindungan sosial. Keterpaduan elemen-elemen tersebut berarti adanya ruang untuk menyatukan berbagai program manajemen risiko bencana berbasis komunitas yang dilaksanakan oleh aktor pemerintah dan aktor non-pemerintah untuk meningkatkan koherensi, koordinasi, dampak, dan keberlanjutan.

Namun, meskipun pendekatan ketangguhan lokal sering dirujuk pada berbasis komunitas (pengurangan risiko bencana berbasis komunitas/PRBBK) atau berbasis desa (desa tangguh bencana/Destana), penting untuk dicatat bahwa keduanya adalah istilah sehari-hari, dan ketangguhan lokal telah berkembang untuk memasukkan **pendekatan berbasis area** (kadang-kadang disebut sebagai Kolaborasi Berbasis Area) yang lebih bersifat kolaboratif dan merupakan inisiatif yang dilaksanakan di sekelompok desa dengan geografi, ancaman, kerentanan, profil ekonomi, atau mata pencaharian yang serupa. Pendekatan tersebut dapat lebih efektif dan efisien dengan memanfaatkan sumber daya lokal (pengetahuan, pembiayaan, aset logistik, dll).

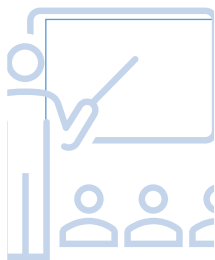
Sebaliknya, ketangguhan lokal dapat berfokus pada **wilayah mikro-geografis tertentu (cekungan sungai atau lembah), kelompok sasaran** (lansia, penyandang disabilitas), atau **mata pencaharian** (petani, UMKM) di dalam satu desa atau kelompok desa. Kegiatan yang fokus dalam parameter-parameter ini lebih bertarget dan berpotensi membutuhkan lebih sedikit kolaborasi dan koordinasi antar kelompok pemangku kepentingan.

## Peran Apa yang Dapat Dimainkan oleh Aktor Non-Pemerintah dalam Membangun Desa Tangguh Bencana Inklusif?

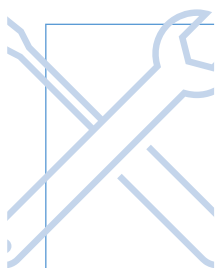
Aktor non-pemerintah dapat memainkan peran penting dalam membangun ketangguhan komunitas yang inklusif dan memastikan hak dan kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan terpenuhi. Terlepas dari peran aktor (organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, media, akademisi), ada nilai tambah dalam dukungan dan keterlibatan mereka dalam proses ketangguhan bencana.



Aktor non-pemerintah memiliki peran kunci untuk merencanakan dalam memastikan bahwa ketangguhan lokal bersifat inklusif.



Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang isu GEDSI, hambatan, dan peluang GEDSI di masyarakat



Mendukung peningkatan kapasitas teknis dan infrastruktur untuk memastikan hambatan GEDSI ditangani, dan hak serta peluang dilindungi



Beberapa contoh pendekatan untuk melibatkan pemangku kepentingan yang berbeda yang dapat dilakukan adalah:




**Untuk berbagai jenis institusi, serangkaian kapasitas dibutuhkan untuk mengarusutamakan GEDSI ke dalam proses-proses operasional dan programatik:**

- Kebijakan internal dan prosedur operasional standar dari kebutuhan institusi harus menjadi sensitif dan inklusif dari sudut pandang GEDSI, dengan menggunakan perspektif GEDSI, dan memasukkan bagaimana kegiatan dilakukan yang berkolaborasi dengan organisasi/mitra organisasi lainnya untuk memastikan inklusif dan tepat dalam sudut pandang GEDSI.
- Institusi harus memiliki manajemen data yang kuat, termasuk mengumpulkan dan menggunakan data terpilih.
- Unit-unit kerja di dalam institusi, yaitu: unit kerja sumber daya manusia, implementasi teknis, keuangan, dan media, informasi dan komunikasi/manajemen pengetahuan, harus melakukan inklusi dan operasionalisasi yang berarusutama GEDSI
- Untuk memastikan pengarusutamaan GEDSI ke dalam fase perencanaan, implementasi, dan monitoring-evaluasi dari program beberapa kegiatan harus dilakukan. Kegiatan-kegiatan itu adalah:

- memperkuat sumber daya manusia dari staf internal dan juga organisasi mitra dengan melakukan rekrutmen dan posisi-posisi untuk sumber daya manusia dengan satu perspektif GEDSi, dan melakukan mekanisme kapasitas dan perspektif di seluruh jenjang
- mengelola operasional program dan sistem di lapangan tentang bagaimana menjangkau dan memfasilitasi kelompok rentan melalui peningkatan kapasitas bagi personel untuk memastikan perspektif dan ketrampilan tentang GEDSI
- mempersiapkan perangkat asesmen yang menempatkan kelompok rentan sebagai subyek dengan menerapkan prosedur operasional standar untuk pengelolaan program, sumber daya manusia, dan dukungan bagi penerima manfaat dengan perspektif GEDSI
- mempersiapkan sistem manajemen data yang mengakomodasi data pilah, dan mempersiapkan sistem informasi dan komunikasi yang aksesibel, termasuk mekanisme umpan balik dan aduan.


## Jenis Intervensi Ketangguhan Lokal yang Membutuhkan Pengarusutamaan GEDSI

**Kegiatan Peningkatan Kesadaran**




- Penjelasan pengantar tentang bencana dan pengurangan risiko bencana (jenis kerentanan dan ancaman, pendekatan pengurangan risiko, peraturan dan pedoman lokal, isu-isu yang muncul seperti perubahan iklim)
- Bagaimana mengarusutamakan GEDSI ke dalam pengurangan risiko bencana untuk memastikan partisipasi kelompok rentan dan terpinggirkan
- Bagaimana berkomunikasi dengan kelompok rentan dan terpinggirkan untuk memastikan mereka dapat mengekspresikan kebutuhan mereka

**Kegiatan Regulasi dan Perencanaan**



- Mendukung pengumpulan dan penggunaan data terpilih
- Berpartisipasi dalam penilaian risiko bencana - mendukung pemetaan kerentanan, termasuk masalah dan hambatan, aset, kebutuhan dan kapasitas kelompok rentan dan terpinggirkan
- Memetakan dan menganalisis kebutuhan, kerentanan, kapasitas, dan kontribusi dari kelompok rentan dan marjinal untuk mengembangkan ketangguhan mereka, dengan menerapkan satu instrumen khusus, seperti misalnya Participatory Rural Appraisal, yang memberikan pendekatan yang sederhana namun komprehensif, yang mengidentifikasi dukungan dan bantuan yang dibutuhkan dari pemerintah daerah atau organisasi lain bagi kelompok rentan dan marjinal untuk meningkatkan ketangguhan
- Terlibat dalam Perencanaan Pengurangan Risiko Bencana, yang harus didasarkan pada data terpilih

**Kegiatan Koordinasi**



- Pasukan Relawan - memastikan pelatihan yang tepat untuk memberdayakan partisipasi kelompok rentan dan terpinggirkan; memahami kebutuhan kelompok-kelompok tersebut dalam keadaan darurat; bagaimana berkomunikasi dengan kelompok-kelompok itu, termasuk selama evakuasi dan pencarian dan penyelamatan
- Forum pengurangan risiko bencana lokal - mendorong dan memberdayakan partisipasi kelompok rentan dan terpinggirkan, termasuk dalam pelaksanaan kegiatan PRB
- Berkoordinasi dengan pejabat pemerintah sebagai mitra strategis, seperti misalnya Kepala Dinas dan anak buah atau mitra kerjanya.
- Berkolaborasi dengan organisasi lokal yang akan mendukung institusi pemerintah berhubungan dengan peningkatan kapasitas untuk mendukung pendekatan jangka panjang, mempertimbangkan pergantian personel di pihak pemerintah.
- Forum PRB dapat terlibat dalam pemberian informasi di tingkat desa tentang risiko bencana, partisipasi komunitas, dan isu disabilitas. Forum DRR dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas untuk menjelaskan lebih jauh tentang isu disabilitas, inklusi sosial, partisipasi penyandang disabilitas dalam bencana, dan konsep desa tangguh bencana yang inklusif.

### Kegiatan Pengurangan Risiko



- Mendukung penerapan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana agar memenuhi kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan (kesehatan, air dan sanitasi, ekonomi/mata pencaharian lokal, lingkungan, keamanan, pangan dan gizi, dll)
- Berkontribusi dalam perencanaan mitigasi bencana desa – mengadvokasi dan memastikan kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan disertakan
- Mengembangkan kapasitas kelompok rentan dan marjinal dengan pengetahuan dan ketrampilan yang sesuai tentang Penanggulangan Bencana untuk meningkatkan kesadaran dan perspektif kelompok pengambil keputusan-kebijakan dan memungkinkan kelompok rentan dan marjinal untuk tetap aman dan memiliki kepercayaan diri ketika terlibat dalam Proses-proses Penanggulangan Bencana. Dengan melibatkan kelompok rentan dan marjinal, sejumlah peserta difasilitasi untuk memungkinkan mereka berpartisipasi secara efektif dan aktif. Lebih lanjut, alokasi waktu dan kesabaran dibutuhkan untuk mendorong mereka agar ikut serta dan terlibat dalam inisiatif Manajemen Risiko Bencana.

### Kegiatan Kesiapsiagaan



- Menyimpan persediaan tanggap darurat di lokasi yang strategis dan mudah dijangkau – kursi roda, kruk, perlengkapan sterilisasi untuk melindungi mereka yang sakit, dll.
- Pengembangan sistem Peringatan Dini Inklusif – sistem harus memiliki bahasa yang jelas dan sederhana, dapat diakses melalui berbagai platform, tersedia dalam bahasa umum dan/atau bahasa lokal
- Menyiapkan Rencana Kontinjensi Desa Inklusif - menyusun skenario dan strategi tanggap darurat yang secara jelas mengartikulasikan kebutuhan dan dukungan yang diperlukan untuk kelompok rentan dan terpinggirkan, berdasarkan data terpilah

### Kegiatan Tanggap Darurat



- Simulasi dan gladi ruang (*Table Top Exercises*) yang mengikutsertakan kelompok rentan dan terpinggirkan sebagai peserta aktif, termasuk pelaksanaan latihan tanggap darurat, pelatihan untuk memastikan kebutuhan kelompok rentan dan terpinggirkan terpenuhi, latihan peringatan dini untuk memastikan komunikasi menjangkau yang paling rentan

## Memastikan Kegiatan Desa Tangguh Bencana Inklusif Menggunakan Daftar Periksa GEDSI

SIAP SIAGA mengembangkan daftar periksa GEDSI untuk mendukung pengarusutamaan prinsip, pendekatan, dan isu GEDSI untuk kegiatan mitranya. Daftar periksa tersebut mencakup semua tahapan pelaksanaan kegiatan: perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan pengelolaan informasi dan pengetahuan. Daftar Periksa ini memfasilitasi aktor untuk memastikan:

- Pemahaman yang komprehensif tentang isu-isu GEDSI dan mendukung fasilitator pelatihan untuk menggunakan etiket yang tepat selama berinteraksi dengan kelompok rentan dan terpinggirkan, terutama penyandang disabilitas dan orang tua.
- Merencanakan bagaimana melibatkan perwakilan dan anggota kelompok rentan dan terpinggirkan dalam semua kegiatan. Ini termasuk mengakomodasi kebutuhan mereka dalam akses dan penggunaan fasilitas, dan partisipasi mereka yang berarti dalam kegiatan dengan dukungan materi KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) dan penggunaan bahasa yang umum.
- Mengidentifikasi dan menganalisis hambatan yang dihadapi oleh perempuan, laki-laki, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok rentan dan terpinggirkan lainnya untuk berpartisipasi penuh dalam kegiatan penanggulangan bencana dan dapat memanfaatkan kegiatan peningkatan kapasitas untuk ketangguhan bencana.
- Advokasi dengan pengambil keputusan khususnya pemerintah desa tentang pentingnya pelibatan kelompok rentan dan terpinggirkan dalam kegiatan penanggulangan bencana, baik dalam pengurangan risiko, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, maupun pemulihan.
- Memasukkan investasi yang tepat sebagai kegiatan manajemen pengetahuan untuk memastikan isu GEDSI tercermin dalam pendekatan yang ada sekarang dan di masa depan, atau berbagai perubahan untuk isu operasional, yang dijawab dengan efektif dan mendapatkan perhatian prioritas di antara para mitra program.

## Daftar Periksa Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial (GEDSI)

Daftar periksa ini dimaksudkan untuk mendukung SIAP SIAGA dan mitranya dalam mengimplementasikan tujuan strategis dalam hal kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan inklusi sosial dalam pengelolaan program. Daftar periksa ini diharapkan dapat digunakan di semua tahap program untuk mengatasi implikasi kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial untuk mendukung tujuan ketangguhan lokal.

### Bagian 1. Penilaian Cepat dan Konsensus

Daftar periksa ini diterapkan selama fase perencanaan untuk menganalisis bagaimana suatu masalah dialami oleh jenis kelamin/kelompok, untuk mengidentifikasi hambatan khusus yang dialami oleh jenis kelamin/kelompok, dan untuk mengidentifikasi dan memahami implikasi dari kegiatan yang diusulkan untuk jenis kelamin/kelompok tersebut.

#### Merencanakan program/proyek Anda untuk memastikan inklusivitas<sup>1</sup>

- a. Ikuti pelatihan wajib tentang Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial yang disiapkan oleh SIAP SIAGA/Palladium. Keikutsertaan dalam pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas anggota staf penerima hibah/mitra dalam memahami isu-isu kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Pelatihan ini meningkatkan sensitivitas terkait dengan masalah ini dan meningkatkan interaksi mereka dengan kelompok rentan.
- b. Miliki pemahaman yang komprehensif tentang siapa yang merupakan kelompok yang terpinggirkan dan rentan, dan pemahaman tentang akses mereka untuk berpartisipasi, kebutuhan dan perhatian khusus mereka, serta pengalaman hambatan/keterbatasan mereka.<sup>2</sup>
- c. Identifikasi kebutuhan praktis dan strategis laki-laki dan perempuan (dalam berbagai kelompok yang kurang beruntung). Kebutuhan praktis terkait dengan tanggung jawab yang terkait dengan peran gender mereka terhadap kebutuhan yang dirasakan segera dan dalam konteks tertentu. Kebutuhan strategis adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mengatasi posisi subordinasi perempuan terhadap laki-laki dalam masyarakat dan terkait dengan pemberdayaan perempuan.
- d. Dapatkan pemahaman dan gambaran yang komprehensif tentang isu-isu kesetaraan gender, inklusi disabilitas dan sosial di bidang intervensi. Dapatkan pemahaman yang komprehensif tentang peraturan dan kebijakan Indonesia yang terkait dengan kelompok terpinggirkan, yang dikeluarkan oleh lembaga

<sup>1</sup>Environmental and Social Safeguard Policy, DFAT, March 2019.

<sup>2</sup> Lihat lampiran Deskripsi Kelompok Marjinal dan Rentan dalam Konteks Manajemen Risiko Bencana

pemerintah nasional, atau oleh lembaga sub-nasional yang berasal dari peraturan dan kebijakan nasional tempat penerima hibah/mitra bekerja.

- e. Miliki pemahaman yang komprehensif tentang peraturan dan kebijakan Indonesia terkait dengan isu-isu inti yang menjadi fokus organisasi. Hal ini terutama diperlukan ketika organisasi ingin mengarusutamakan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam kebijakan dan peraturan Indonesia yang ditetapkan.
- f. Rencanakan bagaimana melibatkan kelompok terpinggirkan dalam proses perencanaan, pastikan partisipasi penuh dan efektif mereka, dan pastikan untuk mengakomodasi fasilitas bagi mereka untuk terlibat secara aktif dan bermakna dalam proses.
- g. Analisis situasi kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan dan kemudian lakukan advokasi untuk menunjukkan pentingnya keterlibatan kelompok-kelompok ini. Rencanakan bagaimana melakukan advokasi terkait dengan isu-isu yang ditargetkan.
- h. Sebelum melakukan perencanaan dan perancangan proyek, bilamana diperlukan, berkonsultasilah dan jalin kerja sama dengan organisasi yang mewakili kelompok-kelompok ini, seperti Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD), Organisasi Hak Perempuan (WRO), dan Organisasi Masyarakat Adat.

#### **Merumuskan anggaran dan merencanakan sumber daya**

- a. Alokasikan anggaran untuk mendukung pelibatan kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan.
- b. Pastikan untuk mengalokasikan anggaran untuk inisiatif advokasi, jika merencanakan untuk melakukan advokasi.
- c. Pastikan untuk mengalokasikan anggaran untuk penelitian/tinjauan singkat tentang isu-isu kesetaraan gender, inklusi disabilitas, dan sosial di bidang intervensi, bilamana diperlukan.
- d. Pastikan anggaran juga akan membiayai aksesibilitas, termasuk materi KIE, alat/instrumen proyek, dan aksesibilitas fisik.
- e. Pastikan ketersediaan sumber daya untuk mengadopsi standar universal dalam memungkinkan partisipasi kelompok yang terpinggirkan dan rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.
- f. Pastikan bahwa pelatihan Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial adalah wajib bagi semua personil.
- g. Pastikan anggaran juga membiayai pelatihan berkelanjutan tentang Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial, sesuai kebutuhan. Ini

termasuk pengembangan kapasitas dalam advokasi, dan penerapan Pertanyaan Washington Group untuk mengonfirmasi data disabilitas.

- h.** Pastikan ruang kerja virtual dan non-virtual, ruang sewaan (seperti hotel dan pusat konferensi), dan media pendukung dapat diakses dan mengacu pada fitur gender, disabilitas dan mitigasi bencana.
- i.** Sedapat mungkin, rekrut penyandang disabilitas dan perempuan, dan pastikan proses rekrutmen dapat diakses.

#### **Merumuskan mekanisme umpan balik**

- a.** Siapkan sistem mekanisme umpan balik yang dapat diakses oleh kelompok terpinggirkan (lihat lebih lanjut di Bagian 4 tentang Komunikasi).
- b.** Rencanakan dan persiapkan pemantauan dan evaluasi untuk meninjau efektivitas mekanisme umpan balik yang ada, dan bagaimana mekanisme telah menjangkau kelompok-kelompok yang terpinggirkan dan rentan.
- c.** Siapkan sumber daya (anggaran dan sumber daya manusia) untuk menerima, mengelola, dan menanggapi umpan balik.
- d.** Pastikan unit/instansi/lembaga yang benar akan menerima umpan balik dan memberikan tanggapan (dalam hal jawaban dan tindakan verbal) yang sesuai.

#### **Pemetaan Pemangku Kepentingan**

- a.** Petakan organisasi/organisasi masyarakat sipil mana yang mewakili kelompok terpinggirkan, termasuk organisasi penyandang disabilitas, yang dapat menjadi mitra proyek.
- b.** Petakan lembaga pemerintah mana (kementerian/lembaga pemerintah, kantor daerah, dll.) yang merupakan pemangku kepentingan utama.
- c.** Petakan siapa/organisasi mana yang merupakan pemangku kepentingan utama yang akan mendukung penguatan Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial.
- d.** Petakan organisasi pemerintah dan non-pemerintah yang bekerja pada advokasi dan pengembangan kebijakan.

#### **Pengumpulan data, penjangkauan dan penilaian masyarakat**

- a.** Rencanakan pengumpulan data di sekitar tempat-tempat masyarakat berkegiatan rutin, dengan mawas diri agar tidak mengganggu acara seperti ritual peribadatan dan/atau tradisional, serta tempat-tempat masyarakat melangsungkan mata pencahariannya dan berkegiatan domestik.

- b.** Sebelum mengumpulkan data, organisasi dapat menggunakan data yang dikeluarkan oleh BPS/Susenas,<sup>3</sup> Dinas Sosial di tingkat daerah, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tingkat daerah sebagai data awal (*baseline*).
- c.** Mengingat kelompok-kelompok terpinggirkan cenderung ragu untuk terlibat dalam kegiatan, berikan undangan kepada mereka sebelum hari pelaksanaan kegiatan. Yakinkan mereka untuk menghadiri acara/kegiatan dan untuk mengambil peran dalam acara/kegiatan jika mereka merasa enggan. Yakinkan mereka bahwa mereka dapat mengekspresikan aspirasinya.
- d.** Pastikan ruangan yang digunakan untuk penjangkauan dan penilaian komunikasi dapat diakses dan terapkan pertimbangan gender dan disabilitas, serta fitur mitigasi bencana.
- e.** Pastikan pertemuan interaktif dapat diakses dengan menyediakan layanan seperti penerjemah bahasa isyarat dan teks berjalan.
- f.** Pastikan alat/instrumen Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) yang didistribusikan/digunakan, dan media pendukungnya dapat diakses oleh penyandang disabilitas dan lansia. Bilamana diperlukan, bahasa daerah dapat digunakan. Bahasa yang sederhana dan pesan yang ringkas harus digunakan.
- g.** Ketika melakukan rapat virtual, pandu masyarakat agar terbiasa dengan aplikasi rapat virtual. Pertimbangkan juga masyarakat dan anggota masyarakat yang tidak memiliki akses ke pertemuan daring (karena tidak ada koneksi internet, masalah listrik, dan tidak mampu membeli/mengakses gawai).
- h.** Sesuai kebutuhan, bentuk kelompok yang berbeda untuk tokoh masyarakat dan masyarakat umum, untuk laki-laki dan perempuan, serta untuk orang dewasa dan anak-anak. Terkadang di forum publik umum, perempuan dan anak-anak tidak berani mengungkapkan pendapatnya.
- i.** Pastikan penyandang disabilitas dapat mengakses pertemuan. Organisasi mungkin harus menjemput/mengantar, atau mengunjungi individu untuk mendapatkan masukan mereka. Organisasi dapat bekerja dengan pekerja sosial/kader pos kesehatan untuk mengidentifikasi mereka yang tidak terdeteksi.<sup>4</sup>
- j.** Informasikan masyarakat bahwa mereka dapat berpartisipasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan-evaluasi, termasuk memberikan umpan balik di semua tahap.
- k.** Cari tahu lebih lanjut tentang kebutuhan masyarakat dan dokumentasikan masukan mereka. Terapkan Washington Group Question untuk

<sup>3</sup>Data SUPAS juga dapat digunakan untuk sumber data terkait Penyandang Disabilitas

<sup>4</sup>Defining marginalised; DFID's Leave no one behind agenda, UK Aid Direct



mengumpulkan data tentang Penyandang Disabilitas, untuk mengonfirmasi kendala dan keterbatasan mereka. Pelatihan Washington Group Question akan diperlukan untuk mengimplementasikan pertanyaan dan untuk membersihkan data yang dihasilkan.<sup>5</sup>

- l.** Pastikan untuk selalu memberikan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin, disabilitas, dan usia (ini adalah persyaratan minimum), dan kemudian tergantung pada proyek, berdasarkan tingkat pendapatan, lokasi, etnis, identitas gender, dll.
- m.** Terapkan informasi dan angka-angka dari data yang terpilah dalam advokasi, untuk mempengaruhi masyarakat dan pengambilan keputusan.
- n.** Libatkan perwakilan kelompok rentan dalam pengumpulan data. Kadang-kadang, misalnya, penyandang disabilitas mungkin merasa lebih nyaman untuk membicarakan pendapat, aspirasi, dan kebutuhannya dengan teman sebaya yang juga merupakan penyandang disabilitas.

#### **Bertemu dengan pemangku kepentingan utama eksternal, termasuk lembaga pemerintah**

- a.** Rencanakan jadwalnya dan kirim undangan.
- b.** Beri tahu mereka tentang program, penerima manfaat langsung/tidak langsung, dan pemangku kepentingan utama lainnya.
- c.** Terima masukan dari mereka.
- d.** Pastikan ruangan yang digunakan dapat diakses dan terapkan pertimbangan gender dan disabilitas serta fitur mitigasi bencana.

#### **Meninjau dan merevisi program kegiatan**

- a.** Tinjau dan analisis masukan dari masyarakat, pemangku kepentingan utama, dan lembaga pemerintah; lakukan revisi jika diperlukan.
- b.** Tinjau dan analisis data dan bukti yang tersedia untuk meningkatkan keterlibatan kelompok terpinggirkan dalam program Penanggulangan Risiko Bencana.

---

<sup>5</sup><http://www.washingtongroup-disability.com/washington-group-question-sets/short-set-of-disability-questions/>

## Bagian 2. Pelaksanaan Kegiatan

Daftar periksa ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua aspek pelaksanaan program berfokus pada peningkatan inklusivitas penanggulangan bencana. Ini termasuk akses ke informasi, aksesibilitas, sensitivitas, dan kepatutan, serta peluang untuk partisipasi yang bermakna.

### **Membangun dan memelihara koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal**

- a. Jalin hubungan dan kerja sama dengan pemangku kepentingan utama yang relevan untuk mempromosikan dan memajukan pendekatan Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial dalam kebijakan, undang-undang, dan rencana nasional Indonesia yang ada.
- b. Jalin hubungan dan pertahankan kerja sama/koordinasi dengan perwakilan kelompok terpinggirkan di berbagai tingkatan.
- c. Akui budaya keagamaan untuk dapat bekerja dengan para pemimpin agama dan adat demi memungkinkan dan menghargai partisipasi dan kontribusi kelompok yang terpinggirkan dan rentan.
- d. Terus informasikan kabar terbaru mengenai perkembangan kegiatan Anda kepada pemangku kepentingan eksternal Anda. Hal ini akan melibatkan mereka dan membangun rasa memiliki, yang penting ketika aktivitas Anda harus diserahkan kepada pemangku kepentingan/sistem lokal yang ada untuk keberlanjutan.

### **Penyebaran informasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas tentang Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial sebagai dasar pengambilan keputusan program/kelembagaan**

- a. Lokakarya pelatihan tentang Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial, dan alat untuk mengidentifikasi dan menggunakan informasi yang relevan untuk desain program, implementasi, pemantauan dan manajemen pengetahuan dan pembelajaran.
- b. Peningkatan kapasitas secara berkala tentang pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial dan etika dalam menangani masalah Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial.
- c. Perkenalkan penerapan Washington Group Questions untuk mengidentifikasi keterbatasan dan kemampuan Penyandang Disabilitas (ini juga dapat digunakan untuk lansia).

- d. Gunakan data dan bukti terpilah yang tersedia terkait dengan kelompok terpinggirkan dan rentan sebagai bagian dari pengambilan keputusan program.
- e. Gunakan umpan balik dari sesi lokakarya pelatihan untuk peningkatan pengembangan kapasitas staf. Pantau dan evaluasi sesi pengembangan kapasitas untuk memperbaiki sesi, dan untuk mendapatkan pembelajaran/praktik yang baik dari kegiatan proyek.

### Melaksanakan Kegiatan

- a. Identifikasi faktor apa saja yang dapat menghalangi perempuan atau laki-laki, penyandang disabilitas, minoritas, dan kelompok kurang beruntung lainnya untuk berpartisipasi penuh dan memperoleh manfaat dari pelaksanaan program (jika relevan) dan analisis bagaimana faktor-faktor ini dapat diatasi.
- b. Pastikan bahwa perempuan, Penyandang Disabilitas, dan kelompok terpinggirkan lainnya terwakili dengan baik dalam peran kepemimpinan, pengambilan keputusan, perencanaan dan evaluasi di semua tingkatan. Dukung pengembangan kapasitas kepemimpinan perempuan dan atasi hambatan partisipasi,<sup>6</sup> dan ini juga harus diterapkan pada Penyandang Disabilitas dan kelompok terpinggirkan lainnya.
- c. Bekerja, berkonsultasi, dan berkolaborasi dengan OMS, WRO, dan OPD yang bekerja secara khusus di bidang marginalisasi dan kerentanan, dan/atau mewakili kepentingan dan kepedulian kelompok-kelompok ini.
- d. Dorong keterwakilan proporsional perempuan dan laki-laki secara proporsional di dalam kelompok-kelompok terpinggirkan ini dalam setiap kegiatan yang terkait dengan proses pengambilan keputusan.
- e. Dorong keterwakilan Penyandang Disabilitas dan kelompok terpinggirkan lainnya secara proporsional dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.
- f. Dorong martabat, kepercayaan diri, dan pemberdayaan kelompok yang kurang beruntung/terpinggirkan dan rentan dalam pelaksanaan program dengan mengakui dan meningkatkan partisipasi mereka yang berarti.
- g. Analisis bagaimana program dapat memengaruhi kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan secara berbeda – baik dampak positif maupun negatif.

---

<sup>6</sup>Diadopsi dari Australia Government, Department of Foreign Affairs and Trade (2016), *Humanitarian Strategy*, p.23

- h.** Gunakan analisis tersebut sebagai dasar kerja advokasi dalam mempromosikan hak-hak mereka.
- i.** Buat pedoman terkait partisipasi kelompok marginal dan rentan. Keyakinan dan kapasitas mereka perlu diperkuat sebelum keterlibatan mereka dalam masyarakat - tanpa persiapan seperti itu, upaya menuju inklusi kemungkinan akan gagal.
- j.** Jika diperlukan, rancang kegiatan intervensi disabilitas khusus untuk meningkatkan ketahanan penyandang disabilitas.
- k.** Selalu tetapkan kuota minimum untuk penerima manfaat kelompok yang terpinggirkan dan rentan jika proyek tidak secara khusus menargetkan kelompok-kelompok ini.
- l.** Saat organisasi melakukan kegiatan advokasi, pastikan untuk mengundang perwakilan kelompok marginal dan libatkan mereka secara aktif dalam pertemuan dengan instansi/pemangku kepentingan pemerintah. Bila memungkinkan, jelaskan kepada pemangku kepentingan sebelum pertemuan tentang etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas.
- m.** Saat organisasi melakukan kegiatan peningkatan kapasitas, pastikan untuk mengundang perwakilan orang-orang yang terpinggirkan dan libatkan mereka secara aktif. Pastikan untuk memberi mereka waktu untuk menyuarakan pendapat mereka. Jika memungkinkan, pisahkan anak-anak dari orang dewasa, perempuan dari laki-laki, dan masyarakat umum dari tokoh masyarakat, agar semua orang merasa nyaman dan percaya diri untuk berbicara. Bila memungkinkan, jelaskan kepada kelompok non-marjinal sebelum pertemuan tentang etika berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Pastikan ruangan/ruang, bahan KIE, alat/instrumen, dan media pendukung dapat diakses. Tuliskan semua aspirasi atau masukan yang diungkapkan oleh orang-orang yang rentan/terpinggirkan setiap kali mereka menghadiri atau berpartisipasi dalam suatu acara, untuk menonjolkan keterlibatan/partisipasi mereka yang berarti.
- n.** When the organisation conducts livelihood activities, make sure the beneficiaries (especially women, elderly people, and persons with disabilities) are comfortable with the tools utilised, based on their physical situation.

**Keputusan yang memengaruhi kelompok-kelompok yang terpinggirkan/tidak beruntung dan rentan dibuat berdasarkan partisipasi dan konsultasi mereka secara penuh dan efektif**

- a.** Promosikan dan advokasikan pada pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat untuk sepenuhnya melibatkan perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, lansia, minoritas, dan kelompok terpinggirkan lainnya

dalam kegiatan program penanggulangan risiko bencana dan pengambilan keputusan. Sedapat mungkin, tingkatkan kapasitas kelompok yang terpinggirkan/rentan tentang cara mengadvokasi para pembuat keputusan, dan tentang bagaimana keputusan/kebijakan dibuat (prosesnya, yang mungkin mencakup pemahaman peraturan terkait proses pengambilan keputusan).

- b. Bekerja dan berkolaborasi erat dengan OPD untuk isu-isu spesifik yang berkaitan dengan disabilitas.
- c. Dorong dan berikan kesempatan bagi kelompok yang terpinggirkan dan rentan, khususnya penyandang disabilitas, untuk menyuarakan persoalan/kepedulian mereka selama konsultasi.
- d. Adakan konsultasi terkait pengambilan keputusan tentang isu-isu yang relevan dalam program, dengan melibatkan kelompok atau perwakilan kelompok yang kurang beruntung dan rentan.
- e. Akui dan terima perbedaan pendapat, gagasan, tingkat partisipasi, dan kepedulian dari perempuan, perempuan kepala keluarga, penyandang disabilitas, lanjut usia, dan kelompok kurang beruntung lainnya.
- f. Tetapkan kuota minimal partisipasi kelompok terpinggirkan dalam semua kegiatan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan.

### Bagian 3. Pemantauan and Analysis

Daftar periksa ini dikembangkan dan digunakan bersama kemitraan masyarakat sipil (termasuk Organisasi Penyandang Disabilitas) untuk pengumpulan data, jaminan kualitas tentang etika, pemberdayaan, dan isu-isu berbasis hak.

**Untuk mengumpulkan informasi yang kuat tentang Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial selama pelaksanaan program guna memberikan saran dan rekomendasi yang memadai kepada mitra dan SIAP SIAGA**

- a. Rencanakan dan gunakan berbagai metode pengumpulan data partisipatif, dan pastikan metode partisipatif menjadi standar organisasi dalam setiap proses studi, pemantauan dan evaluasi. Rencanakan dan gunakan metode untuk menganalisis hasil pengumpulan data.
- b. Libatkan organisasi yang mewakili kelompok rentan/terpinggirkan, seperti OPD untuk pendataan penyandang disabilitas, dan WRO untuk perempuan.
- c. Washington Group Questions harus digunakan untuk mengumpulkan data tentang disabilitas (keterbatasan dan hambatan) berdasarkan spektrum dan jenis disabilitas.

- d. Pastikan untuk melakukan *probing*/pertanyaan lanjutan saat melakukan pengumpulan data kualitatif. Pastikan untuk mengakomodasi fasilitas yang memungkinkan masyarakat rentan/terpinggirkan untuk menyuarakan aspirasi mereka, seperti penerjemah bahasa isyarat atau sejenisnya bilamana diperlukan. Jika ditemani oleh pendamping, pastikan untuk mendengar aspirasi mereka, bukan aspirasi pendamping, karena terkadang pendamping akan berbicara atas nama mereka. Pastikan enumerator/surveyor mengetahui cara berinteraksi dengan kelompok rentan untuk menghindari bahasa/pesan sensitif.
- e. Pilih data berdasarkan jenis kelamin, usia, status, disabilitas, kelompok minoritas, posisi, atau informasi relevan lainnya, dan pastikan bahwa data-data tersebut dilaporkan secara berkala, dan rencana tindak lanjut disiapkan.
- f. Pastikan tidak ada duplikasi dalam penyajian data interseksional untuk menghindari perhitungan ganda.
- g. Pastikan bahwa data terpilih disertai dengan indikator GEDSI lainnya (kualitatif dan kuantitatif) untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang keluaran dan hasil Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial.
- h. Pantau apakah kegiatan yang direncanakan berjalan dengan baik, perbaikan apa yang perlu dilakukan, dan apakah penyesuaian dalam desain program dan kegiatan perlu dilakukan.
- i. Nilai apakah implementasi Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Inklusi Sosial dalam pengelolaan program dan di tingkat lapangan berjalan sesuai rencana.

#### **Mekanisme umpan balik/aduan**

- a. Rencanakan dan tetapkan mekanisme umpan balik dan pengaduan yang dapat diakses oleh kelompok terpinggirkan dan rentan. Pastikan sistem ini berkelanjutan dan dapat dilanjutkan oleh pemangku kepentingan lokal yang relevan.
- b. Mekanisme umpan balik dan keluhan harus ditegakkan/dijaga, diperbarui, dan dilaporkan secara berkala untuk perbaikan dan pembelajaran kelembagaan.
- c. Pastikan adanya pengakuan terhadap berbagai saluran dan metode demi menjamin akses bagi kelompok yang terpinggirkan dan rentan terhadap mekanisme umpan balik.
- d. Teruskan umpan balik dan/atau aduan ke unit yang benar sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk ditanggapi lebih lanjut.
- e. Tanggapi segera umpan balik yang diterima, kemudian adaptasi, dan kembangkan sebagai tanggapan. Jelaskan setiap perubahan yang dilakukan kepada pemangku kepentingan, dan/atau mengapa perubahan tidak mungkin dilakukan.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Diadopsi dari Oxfam Minimum Standard for Gender in Emergency, November 2013, p.7

- f. Lakukan pemantauan yang sering terhadap intervensi program dengan cara yang akan mendorong umpan balik yang akurat untuk memastikan aksesibilitas, kepatutan, dan daya tanggap.<sup>8</sup>

#### Bagian 4. Pembelajaran dan Komunikasi

Daftar periksa ini dikembangkan untuk memastikan bahwa semua kegiatan pembelajaran dan komunikasi, proses dan produk akan: (a) mengantisipasi gaya belajar peserta yang berbeda untuk belajar dan menyerap pengetahuan; (b) memastikan kerahasiaan informasi dan partisipasi; (c) memastikan keterlibatan perempuan, kelompok yang kurang beruntung dan terpinggirkan dalam Kelompok Refleksi; (d) mengakui perempuan dan kelompok lain yang kurang beruntung dan terpinggirkan; (e) memastikan aksesibilitas, kepatutan dan kepekaan dan daya tanggap dalam pendekatan, dan; (f) memastikan bahwa tidak ada keputusan tentang hasil yang dibuat atas nama pemangku kepentingan ini jika mereka tidak hadir.

#### **Merancang dan memproduksi materi/media KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) yang inklusif untuk mengantisipasi gaya belajar yang berbeda**

- a. Berikan dukungan dan bantuan penting bagi penyandang disabilitas, termasuk materi KIE dalam huruf Braille untuk disabilitas netra, atau juru bahasa isyarat bagi orang yang memiliki hambatan pendengaran dan bicara. Pastikan kebutuhan dan bantuan khusus bagi mereka yang tuli dan bisu dan mereka yang memiliki fungsi penglihatan berbeda. Gunakan bahasa yang lebih sederhana untuk orang dengan kesulitan perkembangan, disabilitas kognitif, orang tua, anak-anak, dan orang dengan demensia.
- b. Pertimbangkan bahasa sensitif gender dan non-seksis yang paling tepat untuk digunakan untuk beragam kelompok orang yang terpinggirkan dan rentan.
- c. Pastikan untuk menghindari jargon yang tidak perlu yang dapat menimbulkan salah tafsir. Hindari pernyataan yang bias terhadap upaya Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial, komentar diskriminatif pada kelompok tertentu, atau konotasi negatif yang dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam partisipasi dan komunikasi.<sup>9</sup>
- d. Pahami dan terapkan standar etika untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan penyandang disabilitas dan anggota keluarga atau pendampingnya.<sup>10</sup> Undang anggota keluarga atau pendamping untuk menemani penyandang disabilitas selama pemantauan dan pengumpulan data.

<sup>8</sup>Diadopsi dari Oxfam Minimum Standard for Gender in Emergency, November 2013, p.7

<sup>9</sup>Diadopsi dari Red Cross, A Guide to Gender Sensitive Approaches p.33

<sup>10</sup>Etiket Berinteraksi dengan Penyandang Cacat, Handicap International dan ASB.

- e. Hormati sensitivitas budaya lokal, kepatutan, dan tingkat literasi.
- f. Manfaatkan berbagai saluran komunikasi yang dikenal yang biasa digunakan oleh kelompok, baik saluran komunikasi arus utama maupun non-arus utama.
- g. Konten yang dihasilkan harus menghindari diskriminasi atau stereotip, termasuk dalam foto dan ilustrasi.
- h. Pertimbangkan potensi pesan transformatif gender dalam konten KIE, seperti foto laki-laki mencuci piring, laki-laki menggendong bayi, dan pemimpin perempuan.
- i. Pertimbangkan potensi pesan-pesan kemandirian untuk penyandang disabilitas dalam konten KIE, termasuk foto penyandang disabilitas yang memimpin diskusi.
- j. Pantau dan evaluasi pemanfaatan KIE dan kontennya. Tinjau dan revisi jika diperlukan berdasarkan proses pemantauan dan evaluasi. Termasuk juga alat/konten KIE untuk proses advokasi.

#### **Pemberian informasi di awal dan peroleh persetujuan sebelum partisipasi dan keterlibatan dalam kegiatan program**

- a. Berikan informasi tentang tujuan setiap kegiatan sebelum berpartisipasi.
- b. Persetujuan wajib diperoleh dari kelompok terpinggirkan dan rentan (dan semua peserta) sebelum mengumpulkan informasi atau menggunakan gambar untuk tujuan program.
- c. Dilarang keras memanfaatkan kedukaan penerima manfaat, misalnya dengan memotret lansia yang menangis karena kehilangan anaknya atau memotret orang yang terluka untuk mengumpulkan dana.
- d. Pastikan bahwa proses konsultasi dan komunikasi selama kegiatan, partisipasi kelompok terpinggirkan dan rentan, serta data dan informasi yang dikumpulkan diperlakukan sebagai rahasia.

#### **Manajemen Pengetahuan**

- a. Pastikan data dan informasi dapat diakses oleh kelompok terpinggirkan, termasuk huruf Braille dan penjelasan tertulis tentang grafik untuk orang dengan hambatan penglihatan.
- b. Bagikan data, hasil, ide, alat, pedoman, dan sumber daya yang relevan terkait dengan pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial kepada mitra, untuk meningkatkan keahlian mereka dalam pengarusutamaan



Kesetaraan Gender, Inklusi Disabilitas dan Sosial ke dalam perencanaan program, pelaksanaan, pemantauan, dan pembelajaran.

- c.** Bagikan pembelajaran dan praktik terbaik secara formal dengan mitra, pemangku kepentingan utama lainnya, dan komunitas terkait, terutama kelompok yang terpinggirkan/kurang beruntung dan rentan.
- d.** Identifikasi, dapatkan, simpan, kelola dan analisis data, informasi, serta pengetahuan *tacit*/tidak terucapkan dan pengetahuan nyata secara internal dan eksternal untuk menjadi poin pembelajaran dan praktik yang baik. Sebarluaskan produk-produk pengetahuan secara strategis.

## References

Cohen, J., 2003. *Disability etiquette*. New York: United Spinal Association.

O'Meara, C., 2012. *Disability Inclusive Community Based Disaster Risk Management*. Handicap International.

Paripurno, ET (Ed.), 2021. *Facilitator Technical Module Destana*. Jakarta: Indonesian National Disaster Management Agency.

## Lampiran 1: Kerangka Peraturan PRBBK

Peraturan	Catatan
UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana	
UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa	
UU No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Framework Convention on Climate Change	
Peraturan Pemerintah No. 21 Year 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	
Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	
Peraturan Kepala BNPB No. 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana	
Peraturan Kepala BNPB No. 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana	
Peraturan Kepala BNPB No. 11 Tahun 2014 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana	
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana	
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa	
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa	
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	
Peraturan Menteri Sosial Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana	Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P/82/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim	Untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melaksanakan peningkatan kapasitas tentang adaptasi terhadap dampak dari perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca serta mengenali berbagai kegiatan adaptasi dan mitigasi untuk perubahan iklim yang telah dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan di tingkat daerah berdasarkan pada konteks setempat.
Permendikbud No. 33 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana/SPAB	Penyelenggaraan Program SPAB bertujuan untuk: a. meningkatkan kemampuan sumber daya di Satuan Pendidikan dalam

	menanggulangi dan mengurangi Risiko Bencana; b. meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Satuan Pendidikan agar aman terhadap Bencana; c. memberikan perlindungan dan keselamatan kepada Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan dari dampak Bencana di Satuan Pendidikan; d. memastikan keberlangsungan layanan pendidikan pada Satuan Pendidikan yang terdampak bencana; e. memberikan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik risiko bencana dan kebutuhan Satuan Pendidikan; f. memulihkan dampak bencana di Satuan Pendidikan; dan g. membangun kemandirian Satuan Pendidikan dalam menjalankan Program SPAB.
Keputusan Menteri Kesehatan No. 1529/MENKES/SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif	Salah satu tujuan khususnya adalah untuk mengembangkan UKBM (usaha kesehatan bersumber daya masyarakat) yang dapat melaksanakan survailans berbasis masyarakat (meliputi pemantauan penyakit, kesehatan ibu, pertumbuhan anak, lingkungan, dan perilaku), penanggulangan bencana dan kedaruratan kesehatan, serta penyehatan lingkungan.
Standar Nasional Nomor 7937:2013 tentang Bantuan Kemanusiaan dalam Bencana	
Standar Nasional Indonesia No. 8288: 2017 tentang Manajemen Pelatihan Penanggulangan Bencana	
Standar Nasional Indonesia No. 8751: 2019 tentang Perencanaan Kontinjensi	